

Etika Komunikasi Multikultural pada Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Elvira Marissa Putri¹, Ni Putu Intan Permatasari²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia

E-mail: elviramarissa03@gmail.com¹, intanpermata@undiknas.ac.id²

Article History:

Received: 01 Januari 2026

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 02 Februari 2026

Keywords: etika komunikasi, komunikasi multikultural, pendidikan inklusif, sekolah dasar

Abstract: Penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan multikultural menuntut adanya etika komunikasi yang kuat dari tenaga kependidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami praktik etika komunikasi multikultural yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di SD No. 2 Kekeran dalam konteks layanan pendidikan inklusif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Plt. Kepala Sekolah, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa (Bali dan luar Bali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kependidikan telah mengimplementasikan etika komunikasi multikultural melalui praktik komunikasi yang sopan, menggunakan nada bicara yang lembut, dan bersikap netral dalam interaksi sehari-hari. Mereka berupaya mengedepankan empati, menghormati keragaman budaya dan agama, serta melakukan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman, terutama saat berinteraksi dengan orang tua non-Bali. Praktik ini krusial untuk menciptakan iklim sekolah yang adil, partisipatif, dan menghargai keberagaman, sejalan dengan prinsip Komunikasi Etis. Oleh karena itu, etika komunikasi merupakan fondasi utama dalam menjamin layanan pendidikan inklusif yang profesional dan harmonis.

PENDAHULUAN

Di era keterbukaan global dan digitalisasi yang semakin kuat, pendidikan inklusif menjadi prioritas penting pada berbagai jenjang pendidikan. Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Peraturan Daerah Dinas Pendidikan Nomor 5 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memberikan akses, kesempatan, dan dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Aturan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga menuntut adanya proses komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kurikulum, tetapi juga oleh etika komunikasi di lingkungan sekolah yang multikultural. Dalam konteks keberagaman budaya, bahasa, dan kemampuan individu, komunikasi yang adaptif, partisipatif, dan empatik menjadi fondasi terciptanya proses pembelajaran yang efektif.

Sejalan dengan pentingnya komunikasi yang adaptif tersebut, kondisi lapangan menunjukkan

bahwa penerapannya belum sepenuhnya optimal. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan, terutama dalam aspek komunikasi dan penerapan etika berkomunikasi. Guru dan tenaga kependidikan sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi dan berinteraksi secara adaptif dengan siswa berkebutuhan khusus, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Sukmawati & Fadhilah (2020) serta Astuti & Fitriyah (2021). Minimnya pemahaman mengenai strategi komunikasi inklusif, keterbatasan sarana, serta kurangnya pengetahuan etika profesional memperbesar risiko kesalahpahaman hingga diskriminasi dalam interaksi pendidikan.

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keberagaman budaya yang hadir dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Namun, keberagaman budaya tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Interaksi yang melibatkan perbedaan bahasa, nilai, dan kebiasaan berpotensi menimbulkan salah tafsir makna. Oleh sebab itu, etika komunikasi berperan sebagai pedoman moral dalam menyampaikan pesan yang sopan, objektif, dan menghargai martabat setiap individu (Smitter, 2004). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika komunikasi bukan hanya aspek pendukung, tetapi menjadi fondasi yang memastikan komunikasi multikultural berlangsung saling menghormati.

Pentingnya etika komunikasi juga terlihat jelas ketika dikaitkan dengan konsep pendidikan inklusif sebagai sistem yang menuntut keadilan bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusif sendiri menempatkan semua siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus (ABK) dalam satu lingkungan belajar yang sama tanpa diskriminasi (Staub & Peck, 2007). Konsep tersebut menunjukkan bahwa inklusi tidak hanya tentang menyediakan ruang fisik, tetapi juga membangun komunikasi yang ramah, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, inklusi akan berjalan efektif apabila praktik komunikasi didasarkan pada nilai empati, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Oleh karena itu, kemampuan komunikasi inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga seluruh tenaga kependidikan yang terlibat dalam layanan sekolah. Praktik komunikasi inklusif tidak hanya dilakukan oleh guru sebagai pendidik utama, tetapi juga tenaga kependidikan yang menjadi garda depan pelayanan administrasi sekolah. Mereka berinteraksi langsung dengan siswa dan orang tua dari berbagai latar budaya. SD No. 2 Kekeran, sebagai sekolah dasar dengan lingkungan sosial heterogen, merupakan contoh nyata bagaimana keberagaman hadir dalam proses pembelajaran. Siswa dan wali murid berasal dari Bali, Jawa, Madura, NTB, hingga NTT yang memiliki gaya komunikasi dan dialek berbeda.

Keberagaman yang demikian luas membuat kemampuan berkomunikasi secara etis menjadi semakin krusial. Keberagaman tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sekolah. Di satu sisi, perbedaan latar budaya memperkaya interaksi sosial dan mendorong pengembangan sikap toleransi. Namun di sisi lain, tanpa etika komunikasi yang tepat, perbedaan dapat menimbulkan miskomunikasi. Penelitian Syam (2021) menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi multikultural ditentukan oleh sikap saling menghargai dan keterbukaan antar individu. Oleh karena itu, implementasi etika komunikasi perlu dikaji lebih dalam untuk melihat bagaimana tenaga kependidikan sebagai pelaksana layanan publik sekolah menjalankan perannya dalam konteks pendidikan inklusif.

Dari berbagai uraian tersebut, jelas bahwa masih terdapat ruang kajian yang perlu dieksplorasi lebih mendalam. Melihat realitas lapangan dan kajian teori sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai komunikasi multikultural di sekolah sudah banyak dilakukan, namun fokus yang secara khusus meninjau peran tenaga kependidikan pada sistem pendidikan inklusif masih terbatas. Celah penelitian ini kemudian menjadi dasar dilakukannya

studi ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika komunikasi multikultural pada layanan pendidikan inklusif di SD No. 2 Kekeran dengan fokus pada tiga aspek yaitu implementasi etika komunikasi tenaga kependidikan, praktik komunikasi inklusif terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), serta tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas komunikasi inklusif di sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam bagaimana etika komunikasi multikultural diterapkan oleh tenaga kependidikan dalam layanan pendidikan inklusif di SD No. 2 Kekeran. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menggali makna, pengalaman, serta dinamika interaksi sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka, melainkan melalui penafsiran mendalam terhadap data naratif. Dalam penelitian ini digunakan desain studi kasus yang memungkinkan peneliti memfokuskan kajian pada satu lokasi secara intensif untuk memahami konteks multikultural dan praktik komunikasi yang berlangsung di lingkungan sekolah.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta interaksi langsung dengan informan yang meliputi kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru kelas, wali murid lokal maupun pendatang, serta siswa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menyampaikan pengalaman secara bebas sekaligus tetap sesuai dengan fokus penelitian. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah, khususnya praktik komunikasi tenaga kependidikan saat melayani siswa dan orang tua dari latar budaya yang berbeda. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah, literatur pendukung, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan etika komunikasi, komunikasi antarbudaya, dan pendidikan inklusif.

Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan dipilih berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam layanan pendidikan inklusif. Informan terdiri dari 13 orang yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam mengenai praktik komunikasi multikultural di sekolah. Lokasi penelitian berada di SD No. 2 Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang dipilih karena memiliki karakteristik lingkungan multikultural dan menjadi salah satu sekolah pelaksana pendidikan inklusif.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi penting yang diperoleh selama proses penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari hasil wawancara maupun observasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten dengan fokus penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana tenaga kependidikan menerapkan etika komunikasi dalam lingkungan sekolah yang multikultural serta bagaimana praktik tersebut mempengaruhi keberhasilan layanan pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Etika Komunikasi Multikultural oleh Tenaga Kependidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kependidikan di SD No. 2 Kekeran telah menerapkan etika komunikasi multikultural dalam rutinitas pelayanan administrasi maupun interaksi sehari-hari. Penerapan ini tercermin dari penggunaan bahasa yang sopan, kesediaan mendengarkan, penyesuaian diksi, serta sikap yang menghargai keragaman budaya siswa dan orang tua. Temuan ini sejalan dengan konsep etika komunikasi menurut Smmitter (2004) yang menekankan pentingnya kesopanan, penghargaan martabat manusia, dan objektivitas dalam interaksi multikultural.

Dari wawancara dengan Ni Wayan Suariani, terlihat bahwa tenaga kependidikan memiliki kesadaran untuk menjaga kenyamanan lawan bicara, khususnya orang tua dan siswa pendatang. Ia menyatakan,

“Saat melayani orang tua pendatang, saya berusaha tidak menghakimi dan berbicara dengan kata-kata yang halus supaya mereka merasa diterima.”

Hal ini menunjukkan adanya sensitivitas budaya dalam pemilihan bahasa dan intonasi. Senada dengan itu, I Ketut Rai Suaryasa menambahkan bahwa dirinya sering melakukan klarifikasi makna ketika menemui istilah daerah tertentu:

“Kalau ada istilah daerah yang saya tidak mengerti, saya tanya lagi supaya tidak salah paham.”

Pernyataan ini menggambarkan proses negosiasi makna sebagaimana dijelaskan dalam teori komunikasi antarbudaya Gudykunst & Kim (2003), di mana pemahaman pesan harus disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing pihak. Selain staf sekolah, siswa juga memperkuat temuan bahwa komunikasi tenaga kependidikan berlangsung sopan dan mudah dipahami. Seorang siswa non-Bali menyebut,

“Walaupun kadang saya bingung dengan bahasa Bali, pegawai sekolah selalu menjelaskan ulang dengan sabar.”

Hal tersebut menunjukkan bentuk empati dan adaptasi komunikasi untuk mengurangi hambatan lintas budaya. Temuan lapangan ini memperlihatkan bahwa tenaga kependidikan telah mengupayakan komunikasi yang inklusif dan setara, sehingga memperkuat citra sekolah sebagai ruang belajar yang ramah budaya.

2. Etika Komunikasi dalam Layanan Pendidikan Inklusif

Pada aspek layanan pendidikan inklusif, tenaga kependidikan menunjukkan kemampuan komunikasi yang adaptif, terutama saat melayani siswa berkebutuhan khusus (ABK) dan orang tua mereka. Temuan ini sejalan dengan konsep pendidikan inklusif yang menekankan perlakuan setara, keterbukaan, serta komunikasi empatik sebagai bagian penting dalam proses belajar (Staub & Peck, 2007). Dari hasil wawancara, tenaga kependidikan menggambarkan bahwa mereka berusaha menyesuaikan tempo bicara, bahasa tubuh, serta memberikan penjelasan yang diulang ketika berhadapan dengan siswa ABK. Ni Luh Gede Cahyani Putri mengungkapkan,

“Kami harus bicara pelan, ulangi instruksi, dan melihat ekspresi mereka supaya tidak salah menangkap maksud kami.”

Temuan ini menunjukkan adanya penerapan empati sebagaimana teori Rogers (1983) tentang kemampuan memahami kondisi emosional dan kebutuhan psikologis individu.

Orang tua siswa juga menilai bahwa staf sekolah memberikan pelayanan inklusif yang tidak membedakan latar belakang maupun kondisi anak. Seorang wali murid Bali menyampaikan,

“Kalau anak saya bingung, pegawai sekolah langsung bantu dan tidak membedakan,”

sedangkan orang tua pendatang menambahkan bahwa tenaga kependidikan selalu memberikan informasi secara jelas agar tidak terjadi salah tafsir. Sementara itu, siswa ABK juga merasa didukung. Salah satu siswa pendatang mengatakan,

“Waktu pelajaran budaya Bali saya tidak paham, tapi guru dan pegawai sekolah jelaskan lagi dan tidak marah.”

Temuan ini memperlihatkan bahwa tenaga kependidikan menerapkan komunikasi yang sensitif, suportif, serta terbuka terhadap perbedaan kemampuan, sehingga memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Etika Komunikasi Multikultural

Meskipun penerapan etika komunikasi multikultural sudah berjalan dengan baik, penelitian menunjukkan bahwa tenaga kependidikan masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat kompleks. Tantangan tersebut muncul dari keberagaman budaya, perbedaan bahasa, serta kebutuhan individual siswa yang bervariasi, termasuk siswa ABK. Hal ini mendukung pandangan Ting-Toomey (1999) yang menekankan bahwa komunikasi antarbudaya selalu berpotensi menimbulkan ketegangan dan salah interpretasi apabila tidak ditangani dengan sensitivitas yang memadai.

Salah satu tantangan utama terlihat dari kesalahpahaman karena perbedaan bahasa dan gaya komunikasi. Wali murid pendatang, Friska Amelia, memberikan contoh konkret:

“Pernah terjadi perbedaan interpretasi pesan sekolah karena saya memahami secara literal, sedangkan orang Bali memahami secara tersirat.”

Perbedaan cara memaknai pesan ini merupakan bentuk hambatan high-context dan low-context culture sebagaimana dijelaskan Hall (1976). Selain itu, dalam interaksi antar siswa, perbedaan bahasa juga menjadi kendala. Seorang siswa non-Bali mengatakan,

“Kadang saya tidak mengerti bahasa Bali, dan guru atau pegawai sekolah harus jelaskan lagi artinya.”

Hal ini memerlukan upaya ekstra dari tenaga kependidikan untuk memastikan setiap anak memahami informasi dengan benar.

Pada konteks pendidikan inklusif, tantangan muncul dalam memberikan pendekatan individual, terutama bagi anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan penyesuaian komunikasi. Tenaga kependidikan menyebut bahwa,

“Siswa ABK kadang perlu waktu lebih lama untuk memahami instruksi, jadi kami harus lebih sabar.”

Selain itu, koordinasi antara guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sering kali belum optimal, sehingga informasi tidak selalu tersampaikan secara konsisten.

Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa tantangan komunikasi multikultural tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui peningkatan kompetensi komunikasi, pelatihan khusus, serta sistem koordinasi yang lebih terstruktur. Dengan demikian, sekolah dapat mengoptimalkan layanan pendidikan inklusif yang menghargai keragaman dan menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta didik.

Pembahasan

Implementasi etika komunikasi multikultural yang dilakukan tenaga kependidikan di SD No. 2 Kekeran menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan prinsip-prinsip komunikasi etis melalui penggunaan bahasa yang sopan, nada bicara yang lembut, serta sikap yang menghargai martabat lawan bicara sebagaimana ditunjukkan dalam konsep etika komunikasi oleh Smitter (2004). Upaya tenaga kependidikan untuk melakukan klarifikasi makna ketika menghadapi perbedaan

istilah dan dialek juga sejalan dengan pandangan Gudykunst dan Kim (2003) yang menekankan bahwa negosiasi makna merupakan unsur penting dalam komunikasi antarbudaya. Pada konteks pendidikan inklusif, penyesuaian tempo bicara, pengulangan instruksi, serta perhatian terhadap ekspresi siswa berkebutuhan khusus mencerminkan praktik empati sebagaimana dijelaskan Rogers (1983) mengenai pentingnya pemahaman emosional dalam komunikasi interpersonal. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan, terutama terkait perbedaan gaya komunikasi *high-context* dan *low-context* sebagaimana dikemukakan Hall (1976), yang terlihat ketika wali murid pendatang menafsirkan pesan secara literal sementara masyarakat lokal lebih mengandalkan konteks budaya. Tantangan ini semakin diperkuat oleh kondisi siswa ABK yang membutuhkan pendekatan individual, mendukung pandangan Ting-Toomey (1999) bahwa komunikasi antarbudaya selalu rentan terhadap salah tafsir apabila tidak didukung sensitivitas budaya yang memadai. Dengan demikian, temuan penelitian menggambarkan hubungan yang erat antara implementasi etika komunikasi, praktik komunikasi inklusif, dan tantangan multikultural dalam dinamika interaksi sekolah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Sukmawati dan Fadhillah (2020) yang menemukan bahwa perbedaan bahasa sering menimbulkan hambatan komunikasi pada lingkungan inklusif, sebagaimana juga terjadi di SD No. 2 Kekeran. Penyesuaian komunikasi terhadap siswa ABK yang dilakukan tenaga kependidikan juga sejalan dengan temuan Astuti dan Fitriyah (2021) yang menekankan pentingnya komunikasi adaptif dalam pembelajaran inklusif. Selain itu, perbedaan cara memahami pesan antara orang tua pendatang dan masyarakat lokal dalam penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Syam (2021) yang menunjukkan bahwa keberagaman budaya dapat memicu miskomunikasi tanpa sensitivitas budaya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan terdahulu bahwa keberhasilan layanan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan tenaga pendidik menyesuaikan strategi komunikasi dengan karakteristik budaya dan kebutuhan peserta didik.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai penerapan etika komunikasi multikultural dalam layanan pendidikan inklusif di SD No. 2 Kekeran menunjukkan bahwa tenaga kependidikan telah mampu menerapkan komunikasi yang sopan, terbuka, dan adaptif terhadap keberagaman budaya maupun kebutuhan peserta didik. Implementasi etika komunikasi multikultural tampak melalui penggunaan bahasa yang santun, penyesuaian diksi dengan latar budaya lawan bicara, serta upaya klarifikasi untuk menghindari salah tafsir. Dalam konteks pendidikan inklusif, tenaga kependidikan juga menunjukkan sensitivitas komunikasi kepada siswa berkebutuhan khusus (ABK) melalui tempo bicara yang lebih lambat, pengulangan instruksi, penggunaan bahasa tubuh positif, serta penyampaian informasi kepada orang tua dengan empati dan kehati-hatian. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa perbedaan bahasa dan istilah daerah, miskomunikasi informasi administratif, serta variasi gaya komunikasi orang tua yang memerlukan strategi pelayanan yang lebih fleksibel. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika komunikasi multikultural di SD No. 2 Kekeran telah berjalan baik dan mendukung terlaksananya pendidikan inklusif, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi dan penguatan koordinasi antar pihak sekolah untuk mencapai layanan yang lebih optimal dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Berikutnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian hanya berfokus pada satu sekolah sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan ke konteks sekolah lain yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Selain itu, jumlah informan yang

terbatas serta durasi observasi yang relatif singkat membuat beberapa dinamika komunikasi sehari-hari mungkin belum tergali secara mendalam. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya pelatihan komunikasi multikultural dan komunikasi inklusif bagi tenaga kependidikan agar semakin mampu menjawab tantangan di lingkungan sekolah heterogen. Lebih lanjut, penelitian ini direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan topik yang mengeksplorasi perbandingan praktik komunikasi multikultural di beberapa sekolah inklusi sekaligus, atau mengkaji lebih spesifik strategi komunikasi tenaga pendidik terhadap berbagai kategori ABK sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Al Giffary, M., Rahmat, A., & Nurjanah, S. (2023). Pelayanan publik berbasis komunikasi multikultural. *Jurnal Pelayanan Publik*, 5(1), 12–25.
- Astuti, R., & Fitriyah, N. (2021). Strategi komunikasi guru dalam pembelajaran inklusif. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 8(2), 115–128.
- Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Manap, A. (2022). Komunikasi multikultural dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 87–98.
- Rogers, C. R. (1983). *Freedom to learn for the 80s*. Charles Merrill.
- Smitter, R. (2004). *Ethics of interpersonal communication*. Academic Press.
- Staub, D., & Peck, C. A. (2007). What are the outcomes for nondisabled students? *Educational Leadership*, 64(5), 36–40.
- Sukmawati, L., & Fadhillah, N. (2020). Tantangan komunikasi dalam pembelajaran inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 12(1), 45–54.
- Syam, N. W. (2021). Komunikasi multikultural dalam pendidikan. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 22–31.